

C. Minimnya Tingkat Pendidikan dan Rendahnya Proteksi Pemerintah dalam Mengurangi Kerentanan Perempuan Buruh Tani

Pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara. Pemerintah pusat pun memberikan perhatian khusus akan hal ini. Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan PKH bagi siswa miskin, beasiswa-beasiswa dianggap mampu membantu masyarakat desa terutama yang memiliki keinginan tinggi untuk mengubah hidupnya. Pada dasarnya pendidikan tidak seharusnya diasumsikan dengan sekolah. Karena makna pendidikan sangatlah luas. Bagaimana rumah dan keluarga memberikan pendidikan kepada anak, bagaimana lingkungan membentuk karakter anak dan juga bagaimana alam mengajarkan manusia tentang *survival of the fittest*.

Bagi masyarakat Dusun Cangkringan, pendidikan formal seperti sekolah memiliki peranan penting. Pendidikan yang dimaksud hanya sekedar mendapatkan ijazah kemudian mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Esensi pendidikan sebagai upaya untuk merekonstruksi karakter masyarakat agar mampu mengembangkan diri tidak banyak diserap dengan baik. Meski begitu, masyarakat Dusun Cangkringan kebanyakan berpendidikan SMP-SMA saja. Tidak sedikit pula yang hanya lulusan sekolah dasar. Sedangkan untuk jenjang perguruan tinggi sangat sedikit mengingat munculnya asumsi bahwa lulusan perguruan tinggi tidak menjamin seseorang mendapatkan penghidupan yang layak. Hal ini dicontohkan oleh beberapa masyarakat yang lulusan perguruan tinggi dan hanya bekerja sebagai buruh tani.

total penghasilannya adalah Rp.40.000,- per harinya. Jika tidak ada garapan sawah, perempuan-perempuan buruh tani ini hanya mendapatkan penghasilan Rp.20.000,- per harinya dengan menjadi pengerajin. Belum adanya pendampingan dalam menambah pekerjaan lain juga disinyalir sebagai penyebabnya. Hal ini tentu saja beralasan karena perempuan buruh tani di dusun ini cenderung pasrah dengan kondisi yang ada.

Problem yang kedua adalah ketidaktahuan perempuan buruh terhadap pangsa pasar dan tidak adanya jaringan atau akses yang dapat digunakan untuk menjual hasil produksinya mengakibatkan rendahnya nilai jual hasil produksi masyarakat yang mengakibatkan rendahnya pendapatan masyarakat dan semakin kentalnya dominasi tengkulak sebagai distributor hasil produksi.

Yang ketiga adalah rendahnya proteksi pemerintah desa dalam meningkatkan taraf hidup perempuan buruh tani. Kegiatan pemberdayaan yang melibatkan perempuan buruh tani cenderung tidak ada, sehingga sistem yang dibuat oleh tengkulak di Desa Kedungsugo dibiarkan begitu saja tanpa ada perbaikan dan menilai keterbelengguan itu sebagai hal yang wajar. Adanya anggapan bahwa perempuan buruh tani Dusun Cangkringan tidak akan bisa berkembang ditunjang dengan rendahnya tingkat partisipasi perempuan buruh tani untuk menunjang kehidupannya menjadi lebih baik dinilai sebagai batu sandungan yang dianggap sulit untuk berubah. Padahal sudah semestinya menjadi tugas pemerintah desa untuk memberikan ketegasan dan mengentas akar kemiskinan yang berkembang di masyarakat.